



Pranatan Anyar



KR-Antara/HO-Dok Puspren TNI
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta.

MESKI JUMLAH SAMPEL BANYAK BBTKLPP Pastikan Stok Reagen Cukup

YOGYA (KR) - Penambahan kasus positif Covid-19 di DIY yang masih fluktuatif tidak hanya menjadi tantangan bagi dokter dan paramedis, tapi juga petugas laboratorium. Namun meski dalam sehari jumlah sample yang harus diperiksa cukup banyak, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta memastikan ketersediaan reagen masih mencukupi, sehingga layanan tetap lancar.

"Meningkatnya kasus Covid-19 otomatis jumlah sampel yang masuk juga semakin banyak. Namun kami pastikan semua berjalan lancar, petugas juga bekerja tanpa libur," kata Kepala BBTKLPP Yogyakarta Dr dr Irene MKM, Minggu (31/1).

Irene mengungkapkan, penanganan Covid-19 di DIY membutuhkan komitmen dan sikap proaktif semua pihak. Karena sebagai apapun upaya Pemerintah, tanpa diimbangi kesadaran dan kedisiplinan masyarakat tidak akan banyak berarti.

Karena hanya dengan cara itu penularan Covid-19 bisa ditekan. "Kami terus berupaya meningkatkan layanan, salah satunya dengan mobil laboratorium bergerak," ungkapnya.

Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 menyampaikan, kasus terkonfirmasi Covid-19 harian di DIY per Minggu (31/1) bertambah 254 kasus menjadi 21.825 kasus. Sedangkan pasien sembuh bertambah cukup signifikan sebanyak 394 sehingga menjadi 15.081. Sementara kasus meninggal naik 14 kasus, menjadi 508 kasus.

"Penambahan kasus terkonfirmasi positif harian masih tergolong tinggi. Karenanya masyarakat harus lebih disiplin melaksanakan protokol kesehatan 5M dengan baik, yakni menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas," tandasnya.

(Ria/Ira)-f

PANGLIMA TNI DAN KAPOLRI Tegakkan Prokes di Seluruh Wilayah

JAKARTA (KR) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima kunjungan perdana Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang baru saja dilantik, di Subden Denma Mabes TNI, Jakarta, Minggu (31/1).

"Terima kasih Pak Kapolri, sinergi TNI-Polri dan didukung komponen masyarakat lainnya adalah modal dasar menjaga NKRI," kata Panglima TNI. Menurut Panglima TNI, ada beberapa agenda yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, antara lain Rapat Pimpinan TNI dan Polri pada Februari 2021. "Dalam konteks tugas TNI senantiasa mendukung terlaksananya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri," katanya.

Hadi menyampaikan, saat ini TNI sedang dan terus melaksanakan penegakan protokol kesehatan seluruh wilayah Indonesia, khususnya dengan memberikan edukasi sosialisasi untuk tidak bosan-bosan dan tidak jenuh menggunakan masker. "Karena dengan menggunakan masker maka setiap individu akan saling melindungi satu sama lainnya dari penyebaran Covid-19," katanya.

Menurut Kapolri, tujuan silaturahmi ini untuk terus meningkatkan sinergitas dan soliditas yang selama ini sudah dilaksanakan Ka-

polri sebelumnya. "Kewajiban saya selaku Kapolri baru menjaga dan bahkan meningkatkan sinergitas dan soliditas yang telah kami laksanakan. Karena memang banyak sekali kegiatan-kegiatan penugasan kerja sama dalam hal kamtibmas yang selama ini telah kita laksanakan," tegas Kapolri.

Usai pertemuan singkat itu, Panglima TNI dan Kapolri mengunjungi Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam rangka memantau penerapan protokol kesehatan (prokes) di pasar tersebut, khususnya penggunaan masker. "Mudah-mudahan penggunaan masker ini terus bisa dilaksanakan dan jangan sampai kendor," ujar Panglima TNI.

(Ant/Ati)-f

Efektivitas Penerapan PPKM Dievaluasi

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo masih melakukan evaluasi terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Evaluasi untuk melihat efektivitas dalam menekan kasus penyebaran Covid-19. Dibutuhkan kerja sama semua pihak agar pandemi Covid-19 segera selesai.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Minggu (31/1) mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah selesai menerapkan PPKM tahap pertama pada 11-25 Januari lalu. Evaluasi masih dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sukoharjo untuk mengetahui efektivitas PPKM dalam menekan penyebaran Covid-19.

Pemkab Sukoharjo belum mengetahui hasil dari penerapan PPKM tahap pertama tersebut, sebab masih menunggu 14 hari ke depan, dari perkembangan data kasus yang terjadi.

Evaluasi juga dilakukan selama penerapan PPKM terkait kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Sebab hal itu sangat penting dan mempengaruhi keberhasilan dalam menekan penyebaran. Sedangkan PPKM tahap kedua 26 Januari-8 Februari masih terus dipantau sambil menunggu hasil evaluasi PPKM pertama.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dr Pramesti Griana Dewi mengatakan, kasus Covid-19 di Cilacap masih didominasi klaster keluarga. Sedang klaster lainnya, dari pesantren dan organisasi perangkat daerah (OPD). Kendati angka kesembuhan Covid-19 di Kabupaten Cilacap cukup tinggi, namun belum berpengaruh terhadap tingkat perkembangan kasus Covid-19. Karena

dalam sehari penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Cilacap bisa mencapai 80 orang. Seperti pada Sabtu (30/1), terjadi penambahan 84 pasien. Sedangkan yang dinyatakan sembuh 151 orang, sehingga pasien Covid-19 yang masih dalam perawatan 1.412 orang.

Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat mengatakan, Kantor DPRD Kabupaten Cilacap ditutup sementara setelah seorang anggota dewan dinyatakan positif Covid-19. Penuptan hingga 8 Februari 2021. "Meski ditutup sementara, aduan masyarakat yang bersifat penting tetap diterima dengan menerapkan protokol kesehatan ketat," katanya seraya menyebutkan, aktivitas anggota dewan dilakukan secara daring dan bekerja dari rumah, kecuali rapat yang sangat penting.

(Mam/Mak)-f

HARLAH KE-95 DIISI DOA DAN ISTIGHATSAH NU Masih Berdiri Sesuai Jalurnya

JAKARTA (KR) - Nahdlatul Ulama (NU) pada Minggu (31/1) memperingati Hari Lahirnya (Harlah) dengan tema 'Khidmah NU: Menyebarkan Aswaja dan Meneguhkan Komitmen Kebangsaan'. Tepat pada tanggal itu pula, NU genap berusia 95 tahun merujuk pada tahun Masehi.

Ketua Umum Pengurus Besar (PBNU) Said Aqil Siradj merasa bersyukur pada usia Ke-95 tahun masih berdiri sesuai jalurnya. Ia mengatakan, NU sudah memiliki perjalanan panjang dan ikut andil berkontribusi untuk bangsa Indonesia. "NU sudah banyak andil kontribusinya untuk bangsa ini, sudah banyak lika-likunya. Kadang menjumpai perjalanan yang mudah, tapi tidak sedikit kita jumpai perjalanan yang terjal," kata Said dalam pidatonya pada acara 'Konser Amal dan Harlah NU ke-95' secara virtual, Sabtu (30/1).

"Alhamdulillah sampai hari ini NU masih *on the right track* menjalankan amanah yang kita warisi dari para ulama pendiri NU," sambungnya.

Ia menilai, perbedaan tradisi, perbedaan agama sudah tidak lagi menjadi ganjalan bagi bangsa Indonesia. "Itu harus kita syukuri mapan dalam berbangsa dan bermasyarakat," ujarnya.

Ketua PBNU, Marsudi Syuhud mengatakan, pada acara Harlah ke-95, kemarin juga diadakan istighatsah dan doa bersama.

Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf

Amin, kemarin turut mengucapkan selamat ulang tahun kepada NU. Ucapan selamat ulang tahun itu disampaikan Jokowi melalui akun media sosialnya pada Minggu siang. "Saya berharap agar peran strategis para kiai dan santri NU dalam membangun masa depan Indonesia dapat terus berlanjut. Selamat ulang tahun Nahdlatul Ulama," ucap Presiden Jokowi.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir juga mengucapkan selamat Harlah ke-95 NU. Ia menilai NU bersama Muhammadiyah sebagai dua pilar Islam terbesar dapat terus bergandengan tangan merekat kebersamaan. Selain itu, juga menjadi garda terdepan memajukan umat dan menjayakan bangsa melalui misi *rahmatan lil alamin*.

(Obi/Fsy)-f

“Bertanya, melaporkan, dan menyampaikan pengaduan terkait sektor jasa keuangan akan menjadi lebih mudah..”

APPK

Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen

3 Layanan utama :

- Penyampaian Pertanyaan
- Penyampaian Laporan
- Penyampaian Pengaduan

BANYAKNYA TERPIDANA KORUPSI AJUKAN PK MA Harus Objektif, Independen dan Profesional

JAKARTA (KR) - Terpidana korupsi saat ini banyak yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Sehubungan hal itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharap MA dapat memeriksa permohonan PK yang diajukan terpidana korupsi dengan objektif, independen dan profesional.

"Terkait pengajuan PK, KPK berharap MA dapat memeriksa permohonan tersebut dengan objektif, independen dan profesional dengan mempertimbangkan uraian jaksa KPK dalam memori pendapatnya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/1).

Selain itu, ia menegaskan, KPK siap menghadapi permohonan PK dari para terpidana korupsi tersebut. "KPK siap menghadapi setiap permohonan PK yang saat ini banyak diajukan pihak terpidana," kata Ali seraya menyebutkan, tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK juga sudah menyerahkan kontra memori PK tersebut kepada MA.

Jadi, lanjut Ali, dengan banyaknya di-

ajukan PK, tim JPU sudah menyusun pendapatnya. Bahkan, tim JPU sudah menyerahkan kontra memori atas PK tersebut kepada MA melalui Majelis Hakim PK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Seperti diberitakan, selama 2020, KPK mencatat ada 65 terpidana korupsi yang mengajukan PK. Terhadap hal itu, Ali Fikri mengungkapkan tentang hal lain yang menarik dari PK itu, ada yang tidak melewati upaya hukum biasa.

"Jadi setelah menerima putusan di pengadilan tingkat pertama lalu dieksekusi dan dalam beberapa bulan kemudian mengajukan PK," jelas Ali dalam diskusi virtual, baru-baru ini.

KPK menilai putusan PK yang diterima majelis PK ternyata menurunkan vonis (*strachmacht*) angka hukuman. Sebelumnya Ali juga mengatakan, dengan banyaknya para koruptor mengajukan upaya hukum PK akhir-akhir ini, seharusnya pihak MA dapat membacanya sebagai fenomena yang harus menjadi perhatian khusus.

(Ful)-f

MELALUI

<https://kontak157.ojk.go.id>

Dapat diakses dan digunakan mulai:

1 Januari 2021

Info lebih lanjut, hubungi :

- (021) 157
- 081 157 157 157
- konsumen@ojk.go.id
- Kontak157
- Kontak OJK 157
- Kontak 157

* Kontak 157 OJK adalah layanan bagi Konsumen dan masyarakat pengguna produk dan layanan di sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK.